

**KOMUNIKASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA PRIA DI KECAMATAN
TUGU KOTA SEMARANG**

Maulida Syifaurochmah, Kismartini, Amni Zarkasyi Rahman

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The percentage of men's family planning (KB) policy achievements in Tugu District shows that the number of men with family planning is only 3.71%, consisting of 0.24% (MOP) and 3.47% (Condoms), as well as the lack of promotion through various communication media resulting in There is a myth about male birth control that is developing in society. This research analyzes the communication of men's family planning policies in Tugu District, Semarang City and analyzes the inhibiting factors in this policy communication. A policy implementation model approach that focuses on policy communication to analyze aspects of transmission, clarity and consistency. Research looking at communication transmission shows that it is not optimal, because coordination is rarely carried out, there is a lack of promotional media for men's family planning, and there is no distribution of duties and functions of the Priyo Utomo Association as a men's family planning group. Then, clarity of communication is still lacking, because there is no special content that explains male family planning comprehensively to the target group. In addition, communication is not carried out consistently to policy implementers. Factors inhibiting policy communication include the level of knowledge/education of family planning officers; limited manpower/human resources for family planning officers; as well as a limited budget for socialization and promotion of male family planning activities as well as activating the Priyo Utomo association. It is necessary to develop a broader communication strategy to reach information, involve the role of stakeholders and communication media, make special discussions on male family planning, and optimize the priyo utomo community.

Keywords: *Implementation, policy communication, male family planning, family planning programs*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini berada dalam periode pertumbuhan populasi yang kuat dan diharapkan memiliki penghargaan demografis selama 2020-2030. Penduduk Indonesia pada tahun 2022 setara dengan 3,51% dari total penduduk dunia. Sehingga, keadaan ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk, dimana akan memberikan output yang berdampak positif berupa asset yang sedang dibangun. Meningkatkan kualitas hidup atau kualitas penduduk di seluruh dunia termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ketiga, 'Sehat dan Sejahtera', yang di dalamnya termasuk Kemitraan Keluarga Berencana Global (*Global Family Planning Partnership*) atau keluarga berencana.

Sejalan dengan hal tersebut di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pendapat pemerintah harus lebih banyak digunakan untuk program-program peningkatan pelayanan publik (Syukri & Hinaya, 2019:30-31). Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan kelahiran anak pada jarak dan umur

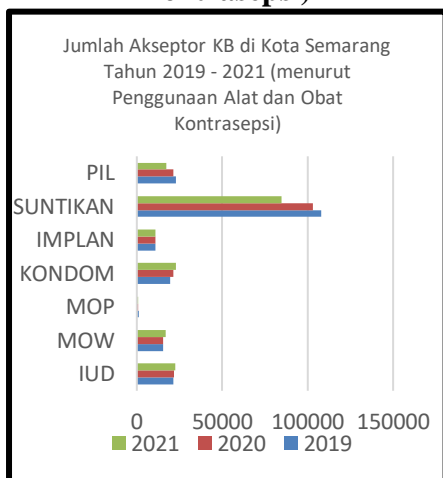
yang sesuai serta merencanakan dan menyusun kehamilan melalui pemajuan, penjagaan, dan penegakan konflik hak reproduksi untuk membangun keluarga yang bertaraf unggul (Kementerian Kesehatan RI, 2014:2).

Upaya menyukseskan tujuan program Keluarga Berencana, salah satu permasalahan utama adalah rendahnya partisipasi pria dalam melaksanakan program KB. Sejalan dengan penjelasan dari Dokter Spesialis Urologi yakni Widi Atmoko mengenai perbandingan pemilihan alat/obat kontrasepsi dalam program KB pria dengan wanita di Indonesia hanya sekitar 7,5 %, dan didukung pula dengan data dari BKKBN di tahun 2017 yang menunjukkan pengguna alat kontrasepsi kondom sebesar 3,12 % sedangkan yang melakukan vasektomi hanya 0,2 %, dimana hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan terkait KB vasektomi (MOP) terutama anggapan bahwa vasektomi disamakan dengan kebiri (Republika.co.id, 2021)..

Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang menyumbang sekitar seperlima penduduk di Jawa Tengah (BPS, 2021a:8) yakni 1.656.564 juta jiwa di tahun 2021. Selain itu, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang notabennya adalah masyarakat perkotaan dengan latar pendidikan dan

budaya dalam hal menjunjung kesadaran tinggi untuk berpartisipasi pada setiap program Pemerintah. Menurut BKKBN, tingkat partisipasi KB diukur dengan proporsi PUS yang mengikuti KB (dalam Fauzie Rahman & dkk, 2017:42).

Gambar 1. 1. Jumlah Akseptor KB di Kota Semarang Tahun 2019-2021 (menurut Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi)



Sumber: (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Bedasarkan yang ditunjukkan Gambar 1. 1, perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan permintaan KB pria adalah jumlah KB MOP yang angkanya paling rendah diantara lainnya, yakni hanya sebanyak 2690 pria dari 1.102 (2019); 920 (2020); 668 (2021). Terkait dengan itu, pada tahun 2021 penggunaan kondom di Kota Semarang berjumlah 22.729 yang jauh lebih banyak dibanding pengguna MOP.

Komitmen Walikota Semarang dalam meningkatkan permintaan KB Pria tertuang di Peraturan Walikota Kota

Semarang Nomor 52 Tahun 2022 Tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045. Namun, kebijakan tersebut hanya menjadi arahan umum penyelenggaraan KB pria. Sementara penyelenggaraan KB MOP (Metode Operasi Pria) yang ditujukan secara khusus (teknis) dalam upaya meningkatkan partisipasi pria yakni belum tersedia.

Penggunaan alat/obat kontrasepsi akseptor KB di Kota Semarang masih didominasi dengan alat/obat kontrasepsi hormonal. Hal ini menunjukkan bahwa para Pasangan Usia Subur (PUS) enggan/belum mengetahui pentingnya kontrasepsi non hormonal sebagai bentuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)/Modern. Dimana perlu diketahui bahwa Kontrasepsi jangka panjang, disingkat MKJP, merupakan metode KB yang berhasil mencegah risiko kehamilan hingga 10 tahun.

Kecamatan Tugu dalam upaya meningkatkan partisipasi KB MOP menjadi Kecamatan terendah di Kota Semarang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Menurut data Laporan Peserta KB Aktif Kecamatan Tugu (2022), presentasi besaran peserta KB MKJP 31,07% dari total PUS sebanyak 5467 (terdiri dari IUD 680, Implan 272, MOP 13, MOW 283) akseptor dan Non MKJP 68,92 % (terdiri dari Suntik 2101, Pil

491, Kondom 190). Sehingga kesertaan pria dalam menggunakan KB Kondom dan MOP hanya mencapai 3,71 %.

Menyebarnya informasi palsu mengenai KB pria menimbulkan pro kontra dan persepsi berlebih dikalangan masyarakat. Kurangnya sosialisasi kebijakan KB Pria kepada pasangan usia subur (PUS) khususnya para pria (suami). Kebijakan KB Pria di Kecamatan Tugu belum adanya perubahan dari sikap dan tindakan terutama dalam menarik perhatian pria (suami) untuk melakukan MOP/vasektomi sebagai pilihan utamanya, selain itu masih banyak para pria (suami) yang salah mengartikan program KB pria melalui MOP/Vasektomi karena adanya mitos yang beredar di masyarakat setelah komunikasi kebijakan dilakukan oleh petugas KB. Sehingga mengapa komunikasi kebijakan tidak dapat mengubah sikap dan tindakan para pria (suami) dalam meningkatkan KB pria di Kecamatan Tugu ?. Dengan demikian, penelitian tentang Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang krusial dilakukan.

Agar dapat mempermudah proses dan arah pembahasan, peneliti merumuskan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang ?
2. Bagaimana faktor penghambat Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang ?

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini dimaksudkan untuk Menganalisis Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang dan faktor penghambatnya.

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) administrasi publik sebagai proses yang berkaitan dengan sumber daya publik dan sumber daya manusia diatur dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Pasolog (dalam Revida et al., 2020:3) juga berpendapat administrasi publik sebagai ilmu dan seni, dimana merupakan suatu bentuk kerjasama antar individu atau kelompok lembaga dalam penyelenggaraan tugas negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara efektif dan efisien. Diperkuat oleh pendapat Hughes yaitu adanya kegiatan

pelayanan publik dan/atau kegiatan pelayanan publik dalam pelaksanaan kebijakan yang diterima dari pihak lain (dalam Revida et al., 2020:4). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu bentuk kegiatan dalam suatu organisasi publik bagi sekelompok orang yang bekerja sama secara rasional untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan tujuan publik melalui proses politik untuk memberikan pelayanan yang prima, efisien dan efektif.

Kebijakan Publik

Menurut Turner dan Hulme dalam Keban (2014:60) melihat *policy* sebagai proses yang meliputi proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan (*policy making and policy implementation*). Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:60), sendiri memberikan pendapat bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan dan sifatnya hirarkis, yakni dari atas ke bawah (*street level*). Secara umum, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintahan atau pejabat pemerintahan (Lemay dalam Keban, 2014:60). Sama halnya kebijakan publik yang dikatakan oleh Thomas R. Dye bahwa “*is what ever government chose to do or ot to do*”,

yang memiliki penjelasan Kebijakan publik mengacu pada apa yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan berupa kegiatan maupun program yang dilakukan oleh organisasi/pemerintah dengan cara tertentu dan pada tahapan tertentu dalam rangka memecahkan masalah publik.

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator ke objek media dengan tujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku (Mani & Guntoro, 2020:ix). Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian pesan dari instansi pemerintah kepada khalayak atau pemangku kepentingan dengan harapan dapat diterima (Mani & Guntoro, 2020:2). Pada prinsipnya komunikasi politik adalah komunikasi yang berlangsung di lingkungan instansi pemerintah, sehingga dapat dipahami untuk menyebarluaskan pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Wahab, 1991:120). George C. Edward III menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan berkenaan dengan

bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat (dalam Nugroho, 2014:144).

Terdapat beberapa unsur yang mendukung terjadinya komunikasi, yaitu: (Mani & Guntoro, 2020:31-33)

1. Sumber, atau disebut komunikator.
2. Pesan, merupakan sesuatu yang disampaikan kepada penerima.
3. Media, merupakan alat untuk memindahkan pesan dari komunikator/sumber ke penerima.
4. Khalayak, atau yang sering disebut dengan komunikan, penerima, dan sasaran.
5. Gangguan, merupakan segala sesuatu yang mendistorsi pesan.
6. Umpan balik, merupakan reaksi atau respon komunikan setelah menerima pesan dari komunikator.
7. Efek, merupakan perbedaan antara apa yang audiens/penerima pikirkan, rasakan, dan lakukan sebelum dan sesudah menerima pesan dari komunikator/sumber.
8. Konteks, merupakan sesuatu yang membingkai komunikasi.

Sementara itu, tujuan umum komunikasi juga disampaikan oleh Santucci dalam (Mani & Guntoro, 2020:37) yaitu sebagai berikut:

1. *To obtain something* (Untuk mendapatkan sesuatu).
2. *To control the behaviour of other people* (Untuk mengontrol perilaku orang lain).
3. *To inform somebody* (Untuk menginformasikan seseorang).
4. *To satisfy a desire for knowledge* (Untuk memuaskan keinginan akan pengetahuan).
5. *To express a feeling* (Untuk mengungkapkan perasaan).
6. *To express the pleasure of being with somebody else* (Untuk mengekspresikan kesenangan bersama orang lain).
7. *To express a psychological condition* (Untuk mengekspresikan kondisi psikologis).
8. *To respect a social status* (Untuk menghargai status sosial).

Komunikasi juga terdapat beberapa bentuk atau tipe. Bentuk-bentuk komunikasi menurut La Mani dan Budi Guntoro adalah komunikasi dengan diri sendiri (*Intrapersonal Communication*), komunikasi antarpribadi (*Interpersonal Communication*), komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, dan komunikasi massa (Mani & Guntoro, 2020:38-41).

Proses komunikasi sangat kompleks karena termasuk neurologis, psikologis, dan fungsi fisik. La Mani dan Budi Guntoro (2020:52) menyampaikan terdapat beberapa dimensi yang berkaitan dengan sifat kontekstual komunikasi yaitu konteks budaya, konteks lingkungan, kesempatan, waktu, dan jumlah orang. Efektivitas komunikasi dapat diukur dari sejauh mana pesan/pemancar dapat dipahami oleh pendengar/komunikator maupun dapat berdampak pada khalayak/komunikator pada tataran kognitif, emosional dan perilaku (Mani & Guntoro, 2020:177).

George C. Edwards III menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: (Subarsono, 2012; Agustino, 2016; Widodo, 2021; C):

1. Transmisi

Berkaitan dengan penyaluran komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan penegakan kebijakan yang tepat (Agustino, 2016). Selain itu, Kebijakan publik harus dikomunikasikan secara langsung dan tidak langsung melalui media tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada aktor

politik dan pemangku kepentingan lainnya (Widodo, 2021). Edward III juga berpendapat bahwa untuk implementasi kebijakan yang sukses, perlu untuk mengkomunikasikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada khalayak sasaran dan mengurangi bias dalam implementasi (Subarsono, 2012:90).

Menurut Edwards III, seringkali terdapat beberapa hambatan komunikasi selama implementasi kebijakan (dalam Winarno, 2016:158). Pertama, ketidaksepakatan antara dan arahan dari pembuat kebijakan yang menciptakan hambatan dan distorsi. Kedua, informasi kebijakan melewati lapisan hierarki birokrasi. Ketiga, persepsi selektif dan keengganan pelaksana untuk mengetahui kebutuhan politik.

2. Kejelasan

Bekaitan dengan kejelasan dan tidak membingungkannya komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (Agustino, 2016). Dengan kejelasan ini, kebijakan dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana, tujuan kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga jelas

tentang tujuan, sasaran, target, dan konten kebijakan. bekerja untuk mempersiapkan dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai kebijakan tersebut secara efisien dan efektif (Widodo, 2021).

Menurut Edwards, ada enam faktor yang menyebabkan ambiguitas komunikasi politik, yaitu kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengecewakan kelompok masyarakat, tidak adanya konsensus tentang tujuan politik, masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari hubungan politik. tanggung jawab dan sifat pembentukan pemerintahan. pengadilan (dalam Winarno, 2016:158).

3. Konsistensi

Berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi atau perintah suatu kebijakan harus tetap pada pendirian awal (Agustino, 2016). Konsistensi ini diperlukan untuk menghindari kebingungan dalam tindakan publik yang diambil dan di antara para pelaksana kebijakan, tujuan kebijakan, dan pemangku kepentingan. Efektivitas penegakan kebijakan dapat efektif

ketika instruksi penegak harus konsisten dan jelas. Arahan penegakan kebijakan yang tidak konsisten membuat para penegak kebijakan terlalu lemah dalam menginterpretasikan dan menegakkan kebijakan, sehingga kecil kemungkinan tujuan kebijakan akan tercapai (Winarno, 2016:158).

Keluarga Berencana Pria

Dasar hukum kebijakan KB mengacu pada pasal 78 Undang-Undang Kesehatan RI No. 36 Tahun 2009, yang mengatur bahwa pelayanan KB harus diatur untuk mengatur kehamilan pasangan. Undang-undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pedoman KB dibuat untuk membantu calon atau calon pasangan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan menggunakan hak reproduksinya. Salah satu tujuan Program Keluarga Berencana dikembangkan sesuai Undang-Undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 20, dengan meningkatkan partisipasi pria dalam kegiatan KB. Partisipasi pria/suami dalam keluarga berencana adalah tanggung jawab pria dalam bentuk

partisipasinya untuk ber-KB sesuai dengan amanat perundang-undangan Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, serta atas perilaku seksualnya sendiri yang sehat dan aman, pasangannya dan keluarganya (Selviani, 2010 dalam Arifin, Sutomo, & Wahyudi, 2018:87) terutama dalam urusan, memberikan dukungan kepada wanita dalam KB dan mendorong masyarakat umum. Partisipasi ini merupakan cara untuk memenuhi hak laki-laki atas informasi dan akses terhadap pelayanan KB (yang aman, efektif, terjangkau dan fleksibel) sehingga mereka dapat memilihnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pemilihan informan didasarkan pada teknik teknik *purposive*, *snowball*, dan *accidental sampling*. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini diantaranya Koordinator PLKB Kecamatan Tugu, Sub Koordinator Kepesertaan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, Sub Koordinator Advokasi dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, Staf

Analisis Pembinaan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, Tim Pokja IV Kecamatan Tugu, Ketua Pemberdayaan Keluarga Kecamatan Tugu, Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tugu, peserta KB MOP, serta masyarakat umum. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:91) yang terdiri dari mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Kualitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang

Transmisi

Berdasarkan hasil pemaparan data diketahui bahwa transmisi penyelenggaraan pelayanan KB bagi pria merupakan kebijakan pemerintah pusat yaitu BKKBN yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi pria dalam KB. Di Kecamatan Tugu, koordinasi dilakukan kepada penyuluh KB dan diteruskan ke tingkat Kelurahan.

Terjalin kerja sama dengan lembaga Kelurahan dan Kecamatan yang berada di bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, petugas Kesehatan yaitu setiap orang yang didedikasikan profesionalitas perawatan kesehatan, yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh selama pelatihan perawatan kesehatan, membutuhkan lisensi untuk jenis kegiatan perawatan kesehatan tertentu. (Antika et al., 2022:14).

Penyaluran informasi komunikasi kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu dilakukan dari kebijakan BKKBN Pusat kepada Walikota Semarang melalui Disdalduk Kota Semarang untuk diteruskan ke lapangan yakni kepada PLKB Tugu (Petugas KB di wilayah Kecamatan) yang kemudian disampaikan kepada SKD/PPKBD (tingkat Kelurahan/desa) dan Sub PPKBD (tingkat RT/RW). PLKB Tugu bekerja sama dengan Lembaga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan seperti LPMK, PKK (Tim Pokja IV), FKK, Tokoh agama dan masyarakat, serta tersedianya Paguyuban Priyo Utomo. Menurut Edwards III, komunikasi yang baik harus menghindari fragmentasi dan kesalahpahaman yang diakibatkan oleh komunikasi melalui

birokrasi bertingkat. (dalam Astuti & Laksmono, 2020:93).

Komunikasi yang dilakukan melalui rakord bulanan para petugas KB merupakan bentuk komunikasi organisasi. Bentuk komunikasi ini adalah “tindakan terorganisir” yang terjadi dan cara orang-orang yang terlibat melakukan transaksi dan memahami apa yang sedang terjadi (Pace dalam Mani & Guntoro, 2020:40). Dimana dipandang untuk mencapai tujuan meningkatkan KB pria di Kecamatan Tugu. Sedangkan, untuk menyampaikan alat/obat dan metode kontrasepsi pria kepada calon akseptor dilakukan dengan pendekatan pribadi ke calon akseptor. Bentuk komunikasi ini terjalin melalui perseorangan atau disebut juga komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), Bentuk komunikasi yang terjadi melalui keterlibatan langsung dua orang atau lebih dalam situasi pribadi (Mani & Guntoro, 2020:38). Komunikasi koordinator PLKB Tugu kepada calon akseptor KB pria berupa percakapan, dialog dan wawancara (Cangara dalam Mani & Guntoro, 2020:39) dengan calon penerima informasi alkon.

Kemudian PLKB Tugu melakukan pendekatan personal kepada calon

akseptor KB serta memanfaatkan momen atau kegiatan (event) tertentu untuk melakukan komunikasi kebijakan. Hal tersebut merupakan proses mentransmisikan stimulus untuk merubah perilaku orang lain (Hoveland dalam Teguh, 2015:45), dimana perubahan perilaku kepada kelompok sasaran KB agar lebih terbuka dengan isu KB pria. Namun kegiatan ini tidak dilakukan dengan rutin dan minim evaluasi. Edward III berpendapat bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan dengan sukses, perlu untuk mengkomunikasikan tujuan dan target kebijakan kepada khalayak dan memangkas bias dalam implementasi dari kelompok sasaran (Subarsono, 2012:90). Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tugu ditentukan oleh peran bakti PLKB Tugu dalam mensosialisasikan tujuan dan manfaat Program KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS) melalui berbagai media. Hal ini sebagai upaya transmisi komunikasi untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan (Winarno, 2016:157).

Upaya yang dilakukan sebagai bentuk kegiatan pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dan tidak terlepas dari kegiatan advokasi serta

pergerakan dari petugas KB di lapangan untuk mempromosikan KB pria maupun mendapat dukungan dari mitra dan *stakeholders*.

Penggunaan media komunikasi seperti aplikasi *WhatsApp* sebagai media untuk koordinasi, serta Instagram sebagai media penyebaran informasi dan penyuluhan program KB pria juga telah dilakukan oleh PLKB Tugu bersama dengan Tim Penggerak KB lainnya. Kemudian, keterlibatan media komunikasi dalam sosialisasi kebijakan sangat kurang dilakukan sebagai media penyampaian informasi dan penyuluhan program kepada sasaran kebijakan. Selain itu, paguyuban priyo utomo yang tidak dimaksimalkan dalam memberikan tanggapannya bagi kebijakan KB pria.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 23 menyebutkan bahwa Pemerintah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dalam hal ini kontrasepsi KB pria. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melibatkan peran media komunikasi dengan cara memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan KB MKJP yakni MOP/vasektomi (kontrasepsi mantap)

seperti pengertian, proses, keuntungan dan kerugiannya, hingga berbagai persoalan yang mungkin ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan antusiasme laki-laki untuk mengikuti KB MOP (Sutinah, 2017:295).

Kejelasan

Ditemuinya beberapa kendala dalam proses penyampaian pangarahan untuk mengedukasi alkon kepada calon akseptor seperti perbedaan pemahaman dan kekhawatiran yang mempengaruhi psikologis calon akseptor untuk menerima materi maupun penjelasan informasi mengenai alkon KB pria. Sehingga menimbulkan prasangka dan pandangan yang berbeda-beda pula terkait alkon KB pria seperti MOP/Vasektomi yang menjadi bagian dari KB MKJP. Ada sedikit budaya atau kepercayaan sosial untuk mendorong penggunaan MKJP, sedangkan non MKJP menjadi pilihan utama karena lebih cepat dan praktis (Antika, Asrinawaty, & Mahmudah, 2022:44). Sehingga hasil dari kurangnya komunikasi dan minimnya informasi tersebut menyisahkan efek/dampak buruk bagi kelompok sasaran yakni mengenai penyebaran informasi yang tidak benar atau mitos yang kian berkembang di masyarakat Tugu terkait partisipasi pria

dalam ber-KB. Ketidakjelasan ini memungkinkan perubahan kebijakan yang tidak terduga karena ambiguitas menyebabkan kesalahpahaman (Winarno, 2016:160). Kurangnya akses laki-laki terhadap informasi dan pelayanan merupakan hambatan dalam mengakses metode KB (Berhane, Biadgilign, Berhane, & Memiah, 2015:470). Informasi yang komprehensif diperlukan untuk memutuskan metode KB kontrasepsi yang akan digunakan (Bessinger & Bertrand dalam Guspianto, 2019:15).

Konsistensi

Berdasarkan hasil penyajian data, diketahui bahwa konsistensi komunikasi kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu apabila terdapat perubahan informasi segera dilakukan pemberitahuan melalui grup *WhatsApp* untuk kader juga kecamatan dan ada beberapa Lurah, selain itu juga melalui rapat koordinasi antara PLKB Tugu dengan Tim Penggerak KB di Kecamatan Tugu, dimana dilakukan setiap bulan. Namun, dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan koordinasi program KB lainnya. Sehingga belum ada pembahasan rutin dan khusus mengenai KB pria. Tidak adanya konsistensi komunikasi ini mengakibatkan masih

adanya kesimpangsiuran penerimaan informasi kepada komunikan. Model Implementasi Kebijakan Edwards III menerangkan bahwasanya implementasi kebijakan efektif ketika pedoman yang diberikan konsisten atau tidak berubah dan didefinisikan dengan jelas (dalam Astuti & Laksmono, 2020:95).

Sejauh ini perubahan informasi dari Disdalduk dan KB Kota Semarang kepada PLKB Tugu untuk diteruskan kepada stakeholders terkait yakni mengenai soal uang pengganti kerja sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Selain itu. konsistensi dalam upaya legalitas pembentukan Paguyuban Priyo Utomo masih minim dilakukan. Padahal melalui paguyuban ini dapat menjaga konsistensi informasi agar meningkatkan pemahaman dan edukasi KB pria. Kegiatan sosialisasi maupun penyampaian pesan/informasi belum dilakukan secara rutin dengan adanya bahasan khusus mengenai KB pria. Apabila tujuannya adalah untuk menambah pemahaman tentang KB bagi laki-laki, maka petugas KB dan tokoh agama wajib memberikan penjelasan secara rinci sesuai dengan kebutuhan setempat (Islami, et.al dalam Teguh, 2015:44).

B. Faktor Penghambat Komunikasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang

Wilayah Kecamatan Tugu yang kecil menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian penyelenggaraan KB pria di Tugu. Kegagalan KB khususnya MOP di Kecamatan Tugu terjadi sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, salah satunya disebabkan oleh istri yang hamil lagi, rumor dan isu MOP yang berkembang pada saat itu, masyarakat yang tidak menganggap KB menjadi suatu yang penting/urgent. Tingkat pendidikan dan pengetahuan, masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang baik mengenai KB pria dengan metode sterilisasi menjadi faktor penentu utama dalam pemilihan alat kontrasepsinya (Wiyatmi dalam Febrianti, 2019:117).

Terkait yang disampaikan oleh Koordinator PLKB Tugu, dapat ditarik benang merah bahwasanya kondisi lapangan mengenai komunikasi kebijakan terhambat dikarenakan ketersediaan SDM yang terbatas bahkan kurang dalam pembagian tugas/kegiatan dari Pusat. Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah tugas/kegiatan yang diembannya. Serta jumlah kader yang

terbatas dan tumpang tindih maupun rangkap jabatan (di PKK dan tim Pokja) dalam memberikan pelayanan KIE. Sehingga dalam memfokuskan untuk upaya komunikasi kebijakan Keluarga Berencana Pria di Kecamatan Tugu tidak dapat berjalan secara maksimal, yang sebabkan juga karena penggarapan yang tidak intens. Hambatan ini hubungan kerja PLKB Tugu bukanlah termasuk atasan, dimana tidak ada kekuasaan (legitimasi) secara struktural serta bawahan untuk memberikan tugas kepada petugas KB yang mana mereka merupakan tenaga sukarelawan yang tidak dibayar. Sehingga dalam menjalin hubungan antara PLKB Tugu dengan petugas KB bersifat diskusi terarah secara bersama.

Upaya memaksimalkan hubungan dengan tim penggerak atau mitra lainnya pada pelaksanaan komunikasi kebijakan di lapangan seperti Paguyuban Priyo Utomo dan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera). Terkendala dengan tidak adanya anggaran secara khusus untuk ormas tersebut, sehingga Koordinator PLKB Tugu memanfaatkan momen-momen atau forum-forum yang ada sebagai pergerakan KB pria. Sejalan dengan keterangan dari Anggota

Pokja IV Tugu yang juga menjadi Tim penggerak KB Tugu dimana di PKK juga tidak ada dana untuk membuat media komunikasi berbentuk poster atau media lain tentang promosi KB pria. Dana PKK sangat terbatas hanya untuk kegiatan seperti rakor dan konsumsi.

Kebijakan MOP atau partisipasi pria di Kota Semarang yang merupakan target bukan peraturan, didapat dari BKKBN Provinsi yang di breakdown ke tingkat Kota hingga ke Kecamatan setiap tahunnya dengan jumlah target yang berbeda. Sehingga belum ada pembuatan kebijakan secara khusus mengenai KB pria di Kecamatan Tugu, karena PLKB beserta Tim Penggerak KB mengikuti kebijakan atau arahan dari pusat terkait peningkatan kesertaan KB pria.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Komunikasi kebijakan keluarga berencana pria di Kecamatan Tugu Kota Semarang dilihat dari transmisi komunikasi yang

menunjukkan belum maksimal, karena koordinasi jarang dilakukan, minimnya media promosi KB pria, serta tidak tersedianya pembagian tugas dan fungsi paguyuban priyo utomo sebagai kelompok KB pria. Kemudian pada kejelasan komunikasi masih kurang, karena tidak ada konten khusus yang menjelaskan mengenai KB pria secara komprehensif kepada kelompok sasaran. Selain itu, komunikasi tidak dilakukan secara konsisten kepada pelaksana kebijakan.

2. Faktor penghambat komunikasi kebijakan diantaranya adalah tingkat pengetahuan/pendidikan petugas KB yang masih rendah; keterbatasan tenaga/sumber daya manusia petugas KB untuk memfokuskan kembali kegiatan terkait komunikasi KB Pria; serta anggaran yang terbatas untuk kegiatan sosialisasi dan promosi KB pria maupun pengaktifan paguyuban priyo utomo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Memasukkan pembahasan khusus mengenai kebijakan KB Pria pada saat adanya rapat koordinasi maupun pertemuan dengan Lembaga-lembaga. Jika memang memungkinkan, dapat melibatkan para ahli;
2. Meningkatkan keterlibatan berbagai media komunikasi secara lebih mendalam dan lengkap melalui metode *online* dan *offline*. Konten yang disajikan harus menyinggung permasalahan KB pria hingga pentingnya partisipasi pria dalam program KB itu sendiri;
3. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat dengan melibatkan peran PKK maupun tokoh masyarakat/agama;
4. Adanya keterbatasan sumber daya manusia/tenaga penyuluh dapat disikapi dengan membentuk dan mengoptimalkan fungsi paguyuban priyo utomo Kecamatan Tugu, sehingga kepengurusan menjadi jelas dan pemberian keleluasan kepada mereka untuk memberikan testimoni setelah menjadi peserta KB MOP/vasektomi

secara rutin kepada kelompok sasaran yang lebih luas;

5. Menggerakkan seluruh Lembaga tingkat Kelurahan dan Kecamatan beserta mitra kerja maupun pemangku kepentingan dalam memperoleh dukungan dana/anggaran tambahan untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan program kepada kelompok sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, R., Asrinawaty, & Mahmudah. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Pengguna MKJP di Puskesmas Alalak Selatan Kota Banjarmasin Tahun 2021. *Uniska Bjm*. Retrieved from http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10734/1/ARTIKEL_RINIE_ANTIKA.pdf
- Arifin, Z., Sutomo, S., & Wahyudi, E. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Jember (Studi Pada Peserta KB Metode Operasi Pria Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember). *Majalah Ilmiah DIAN ILMU*, 17(2), 81–97. <https://doi.org/10.37849/midi.v17i2.85>
- Astuti, W. S., & Laksmono, B. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019. *Papatung*, 3(3), 88–106. <https://doi.org/10.54783/japp.v3i3.323>
- Berhane, A., Biadgilign, S., Berhane, A., & Memiah, P. (2015). Male Involvement in Family Planning Program in Northern Ethiopia: An Application of the Transtheoretical Model. *Patient Education and Counseling*, 98(4), 469–475. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.12.012>
- BPKB Kecamatan Tugu Semarang. (2022). *Laporan Peserta KB Aktif Kecamatan Tugu (Bulan Juli)*.
- BPS. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Jawa Tengah. In *Kementerian Dalam Negeri*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (2021). Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa), 2019-2021. *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*.
- Fauzie Rahman, & dkk. (2017). *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi* (Cetakan 1; M. E. Zulfian, Ed.). Banjarbaru: Zukzez Express.
- Febrianti, S. R. (2019). Gambaran Faktor Predisposing, Enabling, dan Reinforcing KB Vasektomi. *The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(1), 113–123. <https://doi.org/10.20473/jpk>
- Guspianto. (2019). Partisipasi Pria Dalam Penggunaan Vasektomi di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. *Kesmas Jambi*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v3i1.7232>
- Keban, Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis : Administrasi Publik Konsep; Teori dan Isu* (Edisi Ke-3). Yogyakarta: Gava Medsia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Situasi dan Analisis keluarga Berencana*.
- Mani, L., & Guntoro, B. (2020). *Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik (Teori dan Contoh Kasus Aplikasinya)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Republika.co.id. (2021). Partisipasi Pria dalam Program KB Masih Rendah. Retrieved July 10, 2022, from Republika.co.id website: <https://www.republika.co.id/berita/qv1uwr368/partisipasi-pria-dalam-program-kb-masih-rendah>
- Revida, E., Hidayatilloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. iqba., ... Asmarianti. (2020). Teori Administrasi Publik. In J. Simamarta (Ed.), *Teori Administrasi Publik* (Cetakan 1). Yayasan Kita Menulis.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet-10). Bandung: Alfabeta.
- Sutinah. (2017). Partisipasi laki-laki dalam Program Keluarga Berencana di Era Masyarakat Postmodern. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(3), 289–299.
- <https://doi.org/10.20473/mkp.v30i32017.290-299>
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Teguh, M. (2015). Model Komunikasi Kesehatan pada Masyarakat Pedesaan Indonesia (Studi pada Sosialisasi Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur). In A. Ishak (Ed.), *Komunikasi dan Isu Publik* (pp. 43–56). Yogyakarta: ASPIKOM.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).